

Pengelolaan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tilango Kabupaten Gorontalo

Dela Dehi¹, Abdul Kadim Masaong², Surya Indah Nurdin³, Thamrin A. Kum⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: liyadeladehi@gmail.com, suryaindahnurdin@umgo.ac.id, thamrinkum1@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: suryaindahnurdin@umgo.ac.id

Article History:

Received Sep 17th, 2025

Accepted Nov 23th, 2025

Published Nov 26th, 2025

Abstrak

Pengelolaan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tilango, Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui angket yang disebarkan kepada 42 responden yang merupakan pengelola program posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan posyandu berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata persentase capaian 71,63%. Namun, aspek pengorganisasian (68,23%), pengkoordinasian (67,02%), monitoring dan evaluasi (65,24%), serta keberlanjutan program (66,67%) masih berada pada kategori kurang baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengelolaan Posyandu, masih diperlukan peningkatan pada aspek koordinasi lintas sektor, pelatihan kader, transparansi pengelolaan dana, serta inovasi dan integrasi program dengan pembangunan desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan Posyandu yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pengelolaan Posyandu, Puskesmas

Abstract

Integrated health post (Posyandu) management in the Tilango Community Health Center (Puskesmas), Gorontalo Regency, is a community-based health effort to reduce maternal and infant mortality and improve public health. This study aims to describe integrated health post (Posyandu) management in the Tilango Community Health Center (Puskesmas), Gorontalo Regency, including aspects of planning, organization, coordination, monitoring and evaluation, and program sustainability. The research method used was quantitative descriptive, with data collection using a questionnaire distributed to 42 respondents who were integrated health post (Posyandu) program managers. The results showed that integrated health post (Posyandu) management planning was in the fairly good category, with an average achievement percentage of 71.63%. However, aspects of organization (68.23%), coordination (67.02%), monitoring and evaluation (65.24%), and program sustainability (66.67%) were still in the poor category. These findings indicate that despite efforts in Posyandu management, improvement are still needed in cross-sector coordination, cadre training, transparency in fund management, and program innovation and integration with village development. This study recommends the need for policy support, increased human resource capacity, and active community and village government involvement to achieve effective and sustainable Posyandu Management.

Keyword : Posyandu Management, Community Health Centers

1. PENDAHULUAN

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu, adalah salah satu bentuk fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, terutama balita. Posyandu berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Puskesmas dalam menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di posyandu meliputi imunisasi, pemantauan pertumbuhan, pendidikan gizi, serta penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak. Di posyandu, balita mendapatkan layanan seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan mengenai pentingnya gizi dan kesehatan. Kegiatan posyandu biasanya dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan untuk memastikan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala. (Lubis et al., 2025)

Tujuan yang harus dicapai pos pelayanan terpadu yaitu menunjang percepatan penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian anak balita (AKABA) angka kematian ibu (AKI), dan di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya : Balita, anak bayi, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Ibu nifas, pasangan usia subur (PUS). (Khatimah & Suryaningsi, 2024)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu, jauh lebih tinggi dari Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam yang sudah di bawah 100 per 100 ribu kelahiran hidup. Adapun kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. “Jadi, dari 1.000 kelahiran hidup bayi-bayi itu, yang tidak akan mencapai usia satu tahun sekitar 17 orang.

Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sementara itu, untuk kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945.

Berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten Gorontalo, pada tahun 2023 Gorontalo mencatat angka kematian ibu (AKI) yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sebesar 175 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan tantangan yang serius yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Selain itu, angka kematian bayi (AKB) di daerah ini juga menunjukkan angka yang signifikan, yaitu mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menandakan perlunya perhatian dalam hal perawatan neonatal dan kesehatan anak.

Data di kecamatan Tilango, pada tahun 2024, angka kematian ibu (AKI) tercatat sebesar 1 per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian bayi (AKB) juga mencapai 1 per 1.000 kelahiran hidup. Angka-angka ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi, serta upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka kematian.

Data kunjungan posyandu balita di kecamatan Tilango selama empat bulan pertama tahun 2025 menunjukkan jumlah kunjungan masih belum memenuhi sasaran yang ditetapkan. Pada bulan Januari, jumlah kunjungan mencapai 1.149 dari sasaran 1.286, kemudian pada bulan Februari kunjungan meningkat sedikit menjadi 1.166 dari sasaran 1.191. Pada bulan Maret, jumlah kunjungan tercatat 1.144 dari sasaran 1.172, dan pada bulan April kembali menurun menjadi 1.126 dari sasaran 1.239. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar target kunjungan posyandu dapat tercapai.

Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan kunjungan posyandu ibu hamil selama periode Januari hingga April 2025, yaitu: kasus BBLR yang bervariasi antara 1 hingga 5 per bulan, dengan kekurangan energi kronis (Kek) yang meningkat dari 2 di Januari menjadi 10 di Februari, serta

fluktuasi jumlah kunjungan K1 yang berkisar antara 11 hingga 21 dan kunjungan K4 yang tidak konsisten, yang menunjukkan perlunya peningkatan edukasi, pemantauan kesehatan, dan intervensi gizi.

Sasaran kunjungan posyandu remaja di kecamatan tilango, khususnya desa tabumela, adalah remaja yang mengalami masalah gizi seperti status gizi kurus dan anemia. Berdasarkan data dari puskesmas tilango, jumlah remaja dengan status gizi kurus sebanyak 20 orang dan remaja putri yang menderita anemia sebanyak 17 orang. Pada pelaksanaan posyandu remaja di desa tabumela, peserta yang mengikuti posyandu berjumlah sekitar 12 remaja setiap bulan sedangkan untuk jumlah sasarannya itu berkisar 20-25 remaja, jadi hanya sekitar 48% dari sasaran yang berpartisipasi pada kegiatan posyandu.

Pengelolaan posyandu di kecamatan tilango saat ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satu masalah utama adalah kurangnya perencanaan yang matang, yang mengakibatkan sasaran yang ditetapkan sering kali tidak realistis dan sulit dicapai. Selain itu, pengkoordinasian yang kurang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, menyebabkan tidak selaras dalam pelaksanaan program, sehingga mengurangi dampak positif yang diharapkan. Di samping itu, pengorganisasian kegiatan yang tidak optimal sering kali menghambat partisipasi masyarakat, yang merupakan kunci keberhasilan posyandu. Monitoring dan evaluasi yang tidak dilakukan secara rutin juga menjadi kendala, karena hal ini menyulitkan dalam menilai kemajuan program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Tanpa adanya perhatian yang serius terhadap aspek-aspek ini keberlanjutan program posyandu akan terancam dan dampaknya akan dirasakan dalam kesehatan ibu dan anak di masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Peraturan menteri No. 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu (posyandu). Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Tugas posyandu dalam bidang kesehatan meliputi pergerakan kunjungan posyandu bagi sasaran posyandu, Penyuluhan kesehatan dan gizi, deteksi dini risiko masalah kesehatan, rujukan ke unit kesehatan desa/ kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi yang berisiko, pemantauan kepatuhan keluarga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan minimal serta pengobatan penyakit tertentu dan menjaga kesehatan lingkungan rumah, serta penjangkauan akses imunisasi, pemberian vitamin A, dan tablet tambah darah.(Kementerian Dalam Negeri, 2024)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan skor yang telah dicapai masing-masing aspek. Setelah data tersajikan, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut menggunakan dengan presentase. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei sampai bulan juni 2025. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petugas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data yang digunakan angket, observasi, dan presentase. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa univariat yang bertujuan untuk mengolah data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif sederhana, yaitu dengan teknik presentase (%). Kuantitatif deskriptif digunakan untuk memberikan deskriptif atau pembahasan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penelitian ini terdapat lima indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan program posyandu, digambarkan:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Indikator Perencanaan Pengelolaan Posyandu

P	Pernyataan	Skor Capaian	Skor Total	%	Keterangan
P1	Posyandu memiliki rencana kerja tahunan yang terdokumentasi	175	210	83,3	Baik
P2	Penentuan sasaran program posyandu dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	161	210	76,7	Cukup Baik
P3	Tujuan program posyandu ditetapkan secara jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat	153	210	72,9	Cukup Baik
P4	Analisis anggaran dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan posyandu	144	210	68,6	Kurang Baik
P5	Informasi program dan petugas posyandu mudah diakses masyarakat	141	210	67,1	Kurang Baik
P6	Kegiatan kunjungan rumah oleh kader direncanakan secara terjadwal	139	210	66,2	Kurang Baik
P7	Jadwal kegiatan posyandu diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka	140	210	66,7	Kurang Baik
Rata-Rata		-	-	71,63	Cukup Baik

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa rata-rata persentase untuk indikator perencanaan pengelolaan posyandu secara keseluruhan adalah sebesar 71,63% atau masuk dalam kategori cukup baik. Dari ketujuh pernyataan, rata-rata pernyataan mendapat kategori kurang baik dan cukup baik, tetapi terdapat satu pernyataan yang mendapat kategori baik yaitu pada pernyataan nomor 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 1 berikut:

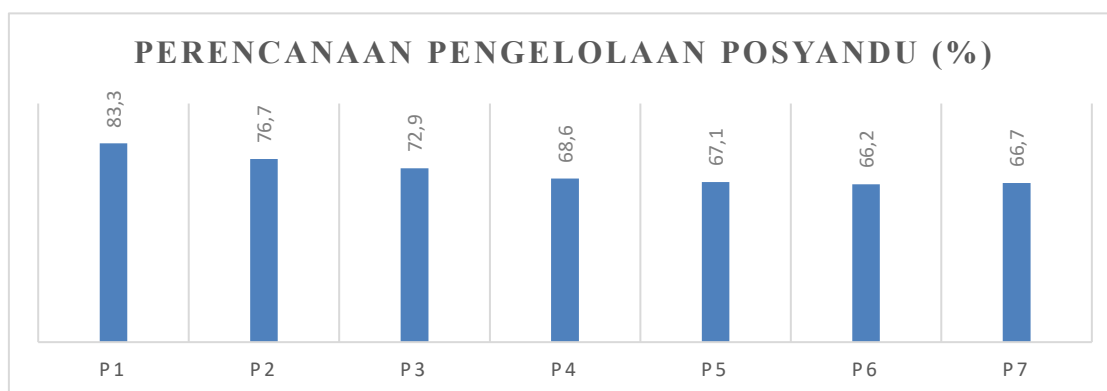


Diagram 1. Perencanaan Pengelolaan Posyandu

Tabel 2. Rangkuman Hasil Indikator Pengorganisasian Pengelolaan Posyandu

P	Pernyataan	Skor Capaian	Skor Total	%	Keterangan
P8	Puskesmas membentuk kelompok kerja atau tim pelaksana program posyandu	157	210	74,8	Cukup Baik
P9	Struktur organisasi dan pembagian tugas posyandu jelas	140	210	66,7	Kurang Baik
P10	Tim pelaksana program posyandu sudah ditetapkan dan berfungsi	146	210	69,5	Kurang Baik
P11	Sarana dan prasarana untuk kegiatan posyandu tersedia dengan baik	136	210	64,8	Kurang Baik
P12	Kader posyandu mendapatkan pelatihan secara berkala	145	210	69,0	Kurang Baik
P13	Dana untuk kegiatan posyandu dikelola dengan transparan	134	210	63,8	Kurang Baik
P14	Tingkat ketersediaan peralatan medis dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk layanan pengelolaan posyandu di wilayah ini	145	210	69,0	Kurang Baik
Rata-Rata		-	-	68,23	Kurang Baik

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa rata-rata persentase untuk indikator pengorganisasian pengelolaan posyandu secara keseluruhan adalah sebesar 68,23% atau masuk dalam kategori kurang baik. Dari ketujuh pernyataan, rata-rata pernyataan mendapat kategori kurang baik, tetapi terdapat satu pernyataan yang mendapat kategori cukup baik yaitu pada pernyataan nomor 8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut:

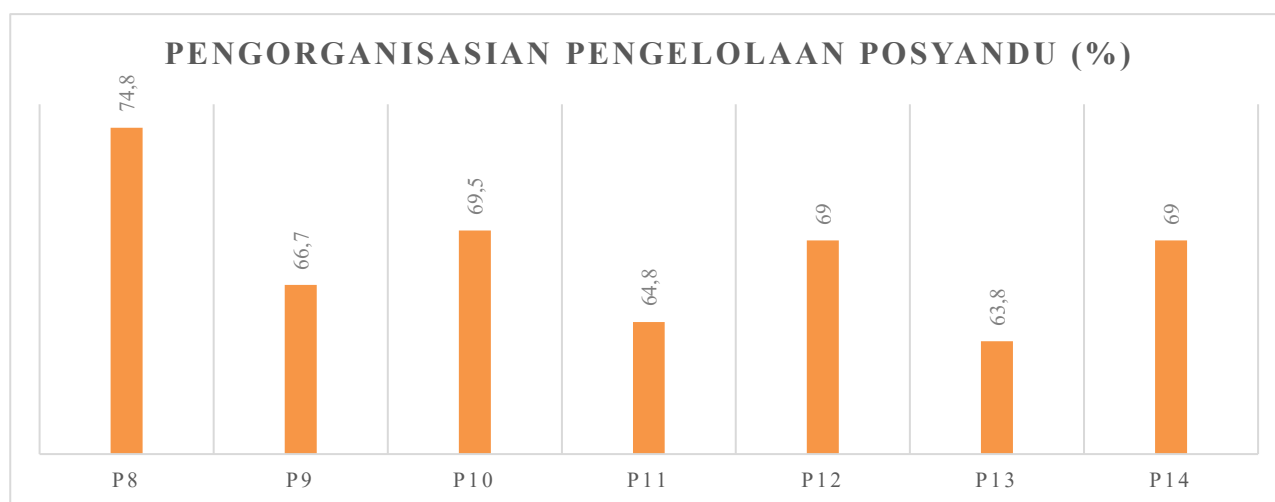


Diagram 2. Pengorganisasian Pengelolaan Posyandu

Tabel 3. Rangkuman Hasil Indikator Pengkoordinasian Pengelolaan Posyandu

P	Pernyataan	Skor Capaian	Skor Total	%	Keterangan
P15	Koordinasi rutin dilakukan antara posyandu dan puskesmas	148	210	70,5	Cukup Baik
P16	Puskesmas memiliki SOP manajemen data posyandu sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku	142	210	77,6	Kurang Baik
P17	Semua pihak memiliki kesepahaman bersama tentang masalah posyandu dan masalah yang diusulkan	134	210	83,8	Kurang Baik
P18	Kader posyandu aktif mengikuti pertemuan koordinasi	139	210	66,2	Kurang Baik
Rata-Rata		-	-	67,02	Kurang Baik

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa rata-rata persentase untuk indikator pengkoordinasian pengelolaan posyandu secara keseluruhan adalah sebesar 67,02% atau masuk dalam kategori kurang baik. Dari keempat pernyataan, rata-rata pernyataan mendapat kategori kurang baik, tetapi terdapat satu pernyataan yang mendapat kategori cukup baik yaitu pada pernyataan nomor 15. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut :

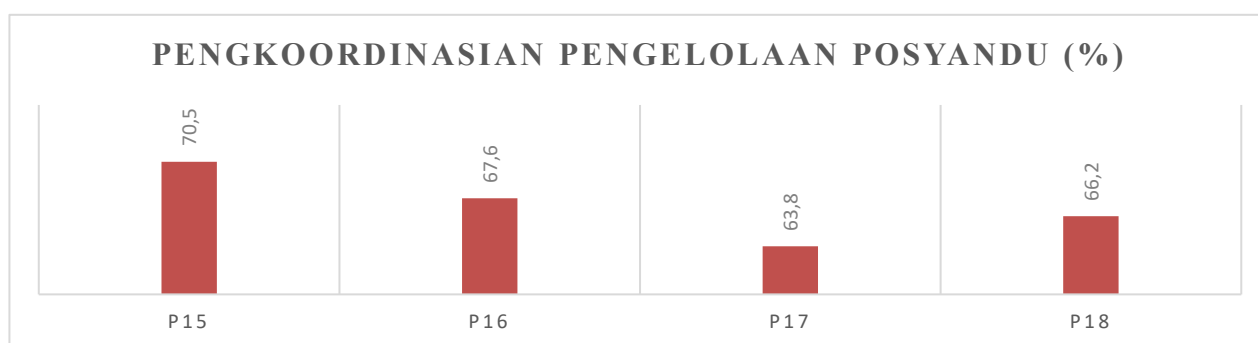


Diagram 3. Pengkoordinasian Pengelolaan Posyandu

Tabel 4. Rangkuman Hasil Indikator Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Posyandu

P	Pernyataan	Skor Capaian	Skor Total	%	Keterangan
P19	Kegiatan posyandu dipantau oleh kader atau petugas kesehatan secara rutin	148	210	70,5	Cukup Baik
P20	Data kegiatan posyandu dikumpulkan secara sistematis	143	210	68,1	Kurang Baik
P21	Data hasil kegiatan posyandu dianalisis dan dievaluasi secara rutin	122	210	58,1	Sangat Tidak Baik
P22	Tindakan perbaikan diambil berdasarkan hasil evaluasi kegiatan posyandu	136	210	64,8	Kurang Baik
P23	Supervisi dari puskesmas dilakukan ke posyandu secara teratur	139	210	66,2	Kurang Baik

P	Pernyataan	Skor Capaian	Skor Total	%	Keterangan
P24	Laporan kegiatan posyandu dibuat dan disampaikan ke pihak terkait	134	210	63,8	Kurang Baik
Rata-Rata		-	-	65,24	Kurang Baik

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa rata-rata persentase untuk indikator monitoring dan evaluasi secara keseluruhan adalah sebesar 65,24% atau masuk dalam kategori kurang baik. Dari keenam pernyataan, rata-rata pernyataan mendapat kategori kurang baik, tetapi terdapat satu pernyataan yang mendapat kategori sangat tidak baik yaitu pada pernyataan nomor 20. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut:

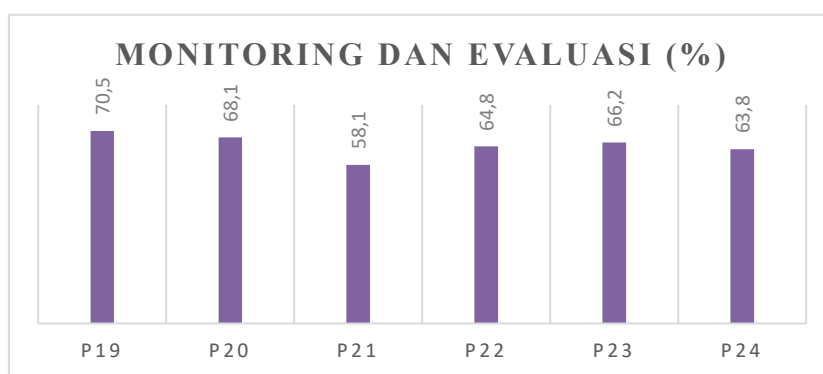


Diagram 4. Monitoring dan Evaluasi

Tabel 5. Rangkuman Hasil Indikator Keberlanjutan Pengelolaan Posyandu

P	Pernyataan	Skor Capaian	Skor Total	%	Keterangan
P25	Pemerintah desa mendukung kegiatan posyandu secara nyata	155	210	73,8	Cukup Baik
P26	Kegiatan posyandu melibatkan peran aktif masyarakat	135	210	64,3	Kurang Baik
P27	Posyandu melakukan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat	138	210	65,7	Kurang Baik
P28	Posyandu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat	134	210	63,8	Kurang Baik
P29	Posyandu terintegrasi dalam program pembangunan desa	138	210	65,7	Kurang Baik
Rata-Rata		-	-	66,67	Kurang Baik

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa rata-rata persentase untuk indikator keberlanjutan program secara keseluruhan adalah sebesar 66,67% atau masuk dalam kategori kurang baik. Dari kelima pernyataan, rata-rata pernyataan mendapat kategori kurang baik, tetapi terdapat satu pernyataan yang mendapat kategori cukup baik yaitu pada pernyataan nomor 25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:

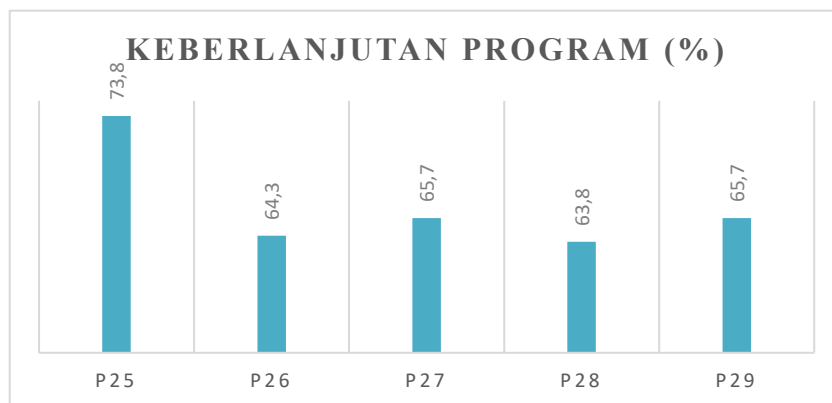


Diagram 5. Keberlanjutan Program

3.2 Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian, perencanaan pengelolaan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tilango, diperoleh rata-rata presentase capaian sebesar 71,63%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan perencanaan di posyandu berada pada kategori “cukup baik”. Artinya, sebagian besar unsur dalam proses perencanaan telah dilakukan, namun belum secara maksimal dan masih terdapat hal yang perlu diperbaiki. Dari tujuh pertanyaan yang menjadi indikator penilaian, hanya satu pernyataan yang memperoleh kategori “baik”, yaitu mengenai keberadaan rencana kerja tahunan yang terdokumentasi. Hal ini mengenai keberadaan rencana kerja tahunan yang terdokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa posyandu telah memiliki dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan, dan hal tersebut menjadi fondasi penting dalam manajemen kelembagaan. Keberadaan dokumen tertulis juga menjadi bukti adanya keseriusan dalam pengelolaan dan arah yang jelas dalam pelaksanaan program. Namun demikian, sebagian besar indikator lainnya masih berada dalam kategori “cukup baik” hingga “kurang baik”. Misalnya, meskipun penentuan sasaran program dan penetapan tujuan sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, nilainya masih berada di bawah batas ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa proses identifikasi kebutuhan belum dilakukan secara mendalam atau belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Ketidaktepatan dalam menetapkan sasaran dan tujuan dapat memengaruhi relevansi program yang dijalankan, sehingga efektivitasnya menjadi kurang optimal.

Aspek-aspek teknis seperti analisis anggaran, perencanaan kunjungan rumah, penyebaran informasi program, serta publikasi jadwal kegiatan kepada masyarakat, masih tergolong rendah dan masuk dalam kategori “kurang baik”. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan transparansi informasi kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahui dengan jelas siapa petugas posyandu, kapan jadwal kegiatan dilaksanakan, atau bagaimana program berjalan, maka partisipasi mereka pun akan rendah. Begitu pula dengan perencanaan anggaran yang kurang matang, hal ini berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, meskipun perencanaan pengelolaan posyandu sudah berjalan, namun hasil ini menunjukkan masih perlunya peningkatan dalam hal keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, dan penyusunan rencana yang lebih sistematis. Perbaikan dalam aspek-aspek tersebut dapat mendorong terwujudnya pengelolaan posyandu yang lebih efisien, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Indikator pengorganisasian pengelolaan posyandu, diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar 68,23%, yang tergolong dalam kategori “Kurang Baik”. Hasil ini mengindikasikan bahwa

aspek pengorganisasian dalam pengelolaan posyandu belum berjalan secara optimal dan masih terdapat berbagai kelemahan yang harus diperbaiki agar posyandu dapat berfungsi lebih efektif sebagai unit pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mardiah (Mardiah et al., 2024) bahwa pelaksanaan program posyandu balita di Desa Baruh Jaya masih kurang efektif karena kendala-kendala dalam operasional posyandu. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya keterampilan kader, kurangnya kehadiran kader KPM dan kepala kader PKK, kurangnya motivasi dan informasi kepada ibu balita, kesalahan dalam penimbangan anak, kurangnya pengetahuan kader posyandu mengenai KB, kurangnya pemahaman ibu balita mengenai pentingnya imunisasi, serta kendala dalam pemberian makanan tambahan dan penanganan diare. Untuk meningkatkan efektivitas posyandu, diperlukan peningkatan keterampilan kader melalui pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program posyandu masih rendah dan kesadaran ibu balita terhadap pola asuh anak masih perlu ditingkatkan. Kader posyandu juga kurang efektif dalam memotivasi ibu hamil dan balita untuk datang ke posyandu serta memberikan edukasi mengenai pola asuh anak yang benar. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air bersih juga menjadi kendala dalam menjaga kebersihan dan kesehatan anak-anak.

Hasil penelitian pengkoordinasian pengelolaan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tilango, diperoleh bahwa rata-rata persentase capaian untuk indikator pengkoordinasian pengelolaan posyandu sebesar 67,02%, yang masuk dalam kategori “Kurang Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa proses koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan posyandu belum berjalan secara optimal, baik dari segi rutinitas, kesepahaman, maupun pelibatan kader dalam kegiatan koordinatif.

Keempat indikator yang diukur, hanya satu indikator yang memperoleh penilaian “Cukup Baik”, yaitu pernyataan bahwa koordinasi rutin dilakukan antara posyandu dan puskesmas, dengan capaian sebesar 70,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian posyandu sudah memiliki hubungan kerja sama dengan puskesmas, meskipun frekuensi dan kualitas koordinasi tersebut masih dapat ditingkatkan. Koordinasi yang baik antara puskesmas dan posyandu menjadi sangat penting, karena puskesmas merupakan pembina teknis utama dalam pelaksanaan program posyandu di lapangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Paramasan (Paramasan al., 2020) yang menemukan bahwa pengelolaan posyandu kurang baik, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, maupun keberlanjutan program. Khususnya, jurnal ini menyoroti peran vital kader sebagai ujung tombak posyandu, di mana rendahnya pengetahuan, minim pelatihan, dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan posyandu yang efektif. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa pengkoordinasian masih menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan posyandu. Diperlukan upaya untuk memperkuat komunikasi lintas pihak, menyusun sistem kerja dan SOP yang terstandar, serta mendorong kader untuk lebih aktif dalam forum-forum koordinatif agar kegiatan posyandu dapat berjalan lebih terarah dan sinergis.

Monitoring dan evaluasi di wilayah kerja Puskesmas Tilango, diperoleh rata-rata persentase capaian untuk indikator monitoring dan evaluasi pengelolaan posyandu sebesar 65,24%, yang tergolong dalam kategori “Kurang Baik”. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemantauan dan evaluasi kegiatan posyandu belum berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Padahal, monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan posyandu dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Monitoring atau Pemantauan pelaksanaan pelayanan posyandu dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan posyandu aktif dan terintegrasi (kemenkes, Pengawasan

et al., 2023). Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja suatu program atau kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seberapa efektif dalam mencapai tujuan tersebut, seberapa efisien dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, serta apa dampaknya terhadap penerima manfaat atau masyarakat secara keseluruhan. Proses evaluasi program melibatkan langkah-langkah seperti perumusan tujuan evaluasi yang jelas, pengumpulan data yang relevan dan akurat, analisis data untuk mengevaluasi kinerja program, dan penyajian temuan evaluasi kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.(Setiawan, 2024)

Keberlanjutan program posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tilango, rata-rata persentase capaian untuk indikator keberlanjutan program pengelolaan posyandu adalah sebesar 66,67%, yang masuk dalam kategori “Kurang Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan posyandu belum sepenuhnya didukung oleh sistem dan keterlibatan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah desa, masyarakat, maupun dari aspek inovasi dan integrasi program. Rendahnya capaian pada indikator-indikator ini menunjukkan bahwa posyandu masih menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan belum sepenuhnya menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat posyandu, kegiatan yang bersifat rutin tanpa pembaruan, serta minimnya keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, lemahnya inovasi dan adaptasi menandakan bahwa posyandu belum responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kasus penyakit tidak menular, masalah kesehatan mental, atau tantangan pasca pandemi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program posyandu masih perlu diperkuat, baik melalui kebijakan desa, keterlibatan masyarakat, maupun peningkatan kapasitas inovasi. Jika keberlanjutan tidak dijaga, maka upaya posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa berisiko tidak konsisten dan sulit berkembang dalam jangka panjang. Asumsi peneliti adalah bahwa keberlanjutan kegiatan posyandu sangat bergantung pada dukungan nyata dari pemerintah desa, keterlibatan aktif masyarakat, serta kemampuan posyandu untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. Tanpa dukungan tersebut, kegiatan posyandu cenderung tidak konsisten dan sulit berkembang secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pengelolaan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tilango secara umum belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Perencanaan posyandu berada pada kategori cukup baik dengan kelebihan pada dokumentasi rencana kerja tahunan, namun sebagian besar indikator lainnya masih kurang memadai, terutama dalam keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, dan perencanaan anggaran. Aspek pengorganisasian, koordinasi, monitoring-evaluasi, dan keberlanjutan program semuanya menunjukkan kategori kurang baik, mencerminkan kelemahan dalam pembagian tugas, komunikasi antar pihak, pelibatan kader, serta dukungan yang minim dari pemerintah dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas posyandu, perlu diperkuat koordinasi lintas pihak, sistem kerja yang jelas, pelatihan kader yang memadai, serta inovasi dan adaptasi program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga keberlangsungan pelayanan posyandu dapat terjaga secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada pihak Puskesmas Tilango yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses pengumpulan data. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Apresiasi yang tulus juga diberikan kepada seluruh responden yang bersedia berpartisipasi, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, terima kasih untuk orang tua dan semua pihak yang membantu selama pengerjaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dietetik, A., Paramasan, P., & Selatan, K. (2020). *Studi ketidakaktifan kader posyandu di Wilayah Kerja. 3*, 60–67.
- kemendes, Pengawasan, P. D., Form, L., & Kunjungan, C. (2023). *panduan pengelolaan posyandu*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. In *Peraturan Menteri Dalam Negeri* (pp. 1–13).
- Khatimah, K., & Suryaningsi, S. (2024). Peran Posyandu untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingkas. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i12.1376>
- Lubis, I., Rahayu, S., Syafira, L. T., Friska, M., Sinaga, M., Khailila, R., Ananda, R., & Karera, A. I. (2025). Peran Kader Posyandu dalam Meningkatkan Partisipasi Ibu Balita. *JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 43–48. <https://doi.org/10.47575/jpkm.v6i1.701>
- Mardiah, Munawarah, & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 343–350. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/513/430>
- Setiawan, I. (2024). *BATUNG KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR*. 422–432.